

## **Konstituante 1955: Dampak Pemilu Pertama Di Kabupaten Jepara Terhadap Politik Lokal**

*The Constituent Assembly Of 1955: The Impact Of The First Election In Jepara On Local Politics*

**Faza Navilla Kamelina Sari**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang

\*Pos-el: [fazakamelina26@students.unnes.ac.id](mailto:fazakamelina26@students.unnes.ac.id)

**Abstrak :** Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 di Jepara merupakan tonggak sejarah penting bagi demokrasi Indonesia, mencerminkan tingginya partisipasi politik masyarakat dan interaksi kompleks antara ideologi agama dan nasionalisme yang mengubah lanskap politik lokal. Meskipun pemilu ini menyebabkan fragmentasi politik, proses demokratisasi yang terjadi membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan inklusif di masa mendatang. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa Konstituante 1955 dan dampak pemilu pertama di Jepara terhadap politik lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui observasi dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu 1955 di Jepara menjadi momen penting dalam politik lokal, ditandai oleh dominasi Nahdlatul Ulama (NU) dan polarisasi ideologi antara NU dan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi mencerminkan pengaruh agama dalam politik, dengan kemenangan NU dan Masyumi menggeser kekuatan PNI, namun juga menyebabkan fragmentasi politik yang memperdalam konflik sosial. Meski demikian, upaya kolaboratif melalui dialog antarpolisi dan pendidikan politik diharapkan dapat memperbaiki stabilitas politik dan kehidupan demokrasi di Jepara. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi ideologi dan fragmentasi politik dalam Pemilu 1955 mempengaruhi stabilitas politik lokal, sehingga diperlukan strategi kolaboratif untuk mencapai demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata-Kata Kunci :** Konstituante, Pemilu 1955, Jepara, Nahdlatul Ulama, Politik.

**Abstract:** *The 1955 General Election in Jepara was a significant milestone in Indonesia's democracy, showcasing high political participation and the complex interplay between religious ideology and nationalism, which reshaped the local political landscape. While this election led to political fragmentation, it also paved the way for broader and more inclusive participation in the future. The aims of this research is to examine the events surrounding the 1955 Constituent Assembly and the impact of the first election on Jepara's local politics. This study uses a descriptive qualitative method with literature-review. The findings reveal that the 1955 election in Jepara was a pivotal moment in local politics, dominated by Nahdlatul Ulama (NU) and characterized by ideological polarization between NU and the Indonesian National Party (PNI), which led to social tensions. High political participation highlighted the influence of religion in politics, with NU and Masyumi's victory reducing PNI's power but contributing to political fragmentation and deepening social conflict. However, collaborative efforts such as inter-party dialogue and political education are expected to enhance political stability and democratic life in Jepara. The study concludes that ideological polarization and political fragmentation in the 1955 election impacted local political stability, requiring collaborative strategies for inclusive and sustainable democracy.*

**Key Words:** *Constituent Assembly, 1955 Election, Jepara, Nahdlatul Ulama, Politics*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia sebagai pemilu pertama yang diadakan setelah kemerdekaan. Momen ini tidak hanya menandai proses demokrasi Indonesia yang baru mulai berkembang, tetapi juga menggambarkan perubahan signifikan dalam dinamika politik lokal di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di Jepara, Pemilu 1955 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik nasional, sembari memperkenalkan sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif dibandingkan dengan sistem politik tradisional yang sebelumnya mendominasi. Peralihan ini mendorong masyarakat Jepara untuk menyesuaikan diri dengan tantangan politik modern, di mana persaingan antar calon pemimpin semakin ketat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan menjadi kunci dalam menentukan hasil politik lokal (Lutfiana, 2017). Jepara, yang sebelumnya terpengaruh oleh sistem politik tradisional, kini harus berhadapan dengan sistem politik modern yang lebih terbuka dan kompetitif.

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diadakan di Indonesia, berlangsung pada masa transisi ketika bangsa Indonesia masih dalam proses membangun identitas politik dan sosialnya. Pada saat itu, meskipun berbagai aspek kehidupan masyarakat sedang berkembang, ketidakstabilan politik dan ekonomi masih terasa di berbagai daerah (Efriza, 2019). Pemilu ini memiliki peran penting dalam pembentukan kekuasaan politik, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Jepara. Di Jepara, pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan dinamika politik lokal, di mana para calon menggunakan berbagai strategi untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Pola komunikasi politik yang terjalin erat dengan masyarakat, ditambah dengan semangat kebangsaan yang baru tumbuh serta pengaruh

kuat dari ideologi keagamaan, membuat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 1955 di Jepara sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masih dalam tahap awal demokrasi, kesadaran politik masyarakat sudah mulai berkembang.

Organisasi keagamaan memainkan peran signifikan sebagai basis kekuatan politik bagi para calon dalam Pemilu 1955. Di Kabupaten Jepara, yang dikenal memiliki basis keagamaan Islam yang kuat, partai-partai berbasis Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan dukungan besar dari masyarakat (Pipit Nur'Aini, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana agama menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi politik warga. Masyumi, yang merepresentasikan Islam modernis, serta NU, yang berakar pada tradisi Islam tradisional, menjadi kekuatan politik dominan di Jepara, menggantikan partai-partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), yang sebelumnya memiliki pengaruh lebih besar. Pergeseran dukungan ini mencerminkan dinamika politik lokal yang sangat dipengaruhi oleh faktor keagamaan, di mana partai-partai Islam berhasil meraih simpati masyarakat melalui pendekatan keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Agama, dalam hal ini, bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga kekuatan politik yang efektif dalam membentuk aliansi dan kekuatan elektoral.

Keberhasilan partai-partai Islam dalam meraih dukungan luas di Jepara pada Pemilu 1955 mencerminkan hubungan erat antara agama dan politik lokal pada masa itu. Pemilu tersebut tidak hanya menjadi kompetisi antarpolitical, tetapi juga menjadi arena interaksi antara ideologi agama dan nasionalisme. Partai-partai Islam mampu menarik simpati masyarakat dengan mengangkat isu-isu keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat dukungan di kalangan pemilih yang sangat religius. Sementara itu, partai-partai nasionalis seperti PNI mencoba mempertahankan pengaruhnya dengan

mengusung isu-isu nasional yang lebih luas, terkait dengan semangat kebangsaan dan pembangunan negara. Dinamika ini menunjukkan bahwa Pemilu 1955 di Jepara bukan hanya tentang politik elektoral semata, tetapi juga tentang bagaimana dua kekuatan ideologis agama dan nasionalisme saling berinteraksi dan kadang berbenturan dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat (Ahmad et al., 2019).

Meskipun Pemilu 1955 di Jepara menghasilkan dampak negatif berupa fragmentasi politik yang dapat memicu ketegangan antar kelompok, proses demokratisasi yang berlangsung memberikan peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif di masa depan. Fragmentasi ini terjadi karena banyaknya partai politik yang muncul, masing-masing dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda, yang terkadang sulit untuk disatukan. Namun, meski terdapat perpecahan, semangat masyarakat untuk terlibat dalam politik menjadi semakin kuat, menciptakan ruang untuk dialog dan kolaborasi di antara berbagai pihak. Jepara, dengan segala kompleksitas politik dan sosialnya, mencerminkan perjalanan demokrasi Indonesia yang masih dalam proses evolusi. Di daerah ini, interaksi antara elemen-elemen sosial, seperti komunitas agama dan budaya lokal, berperan penting dalam membentuk dinamika politik. Melalui pemilu, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka untuk masa depan. Dengan kata lain, meskipun tantangan politik yang ada cukup besar, pengalaman di Jepara menunjukkan bahwa proses demokrasi dapat berkembang, mengarah pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan menciptakan masyarakat yang lebih berpartisipasi serta berdaya.

Pemilu 1955 tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah politik nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana proses demokratisasi berjalan di berbagai daerah, termasuk di Jepara, dengan tantangan-tantangan uniknya. Meskipun partisipasi

politik masyarakat di Jepara cukup tinggi, masih ada hambatan dalam pelaksanaan pemilu yang sepenuhnya demokratis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi politik dan rendahnya tingkat pemahaman mengenai proses pemilu. Faktor-faktor ini sebagian besar dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan politik dan ketimpangan distribusi informasi di kalangan masyarakat. Namun, meski dengan keterbatasan tersebut, semangat dan antusiasme masyarakat Jepara untuk berpartisipasi dalam pemilu memberikan harapan positif bagi perkembangan demokrasi lokal. Kesadaran politik yang mulai tumbuh ini mencerminkan optimisme akan masa depan politik yang lebih baik dan partisipatif di Jepara, meskipun tantangan dalam hal akses informasi dan pemahaman politik masih perlu untuk diatasi.

Setelah Pemilu 1955, konfigurasi politik lokal di Jepara mengalami perubahan signifikan yang berdampak besar pada struktur kekuasaan di daerah tersebut. Sebelum pemilu, para pemimpin lokal biasanya terikat pada struktur kekuasaan tradisional yang didasarkan pada status sosial, hierarki, dan hubungan kekeluargaan. Kepemimpinan sering kali diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas (Panggabean & Harahap, 2024). Namun, pasca-Pemilu, arena politik menjadi lebih terbuka dan kompetitif, memaksa para pemimpin lokal untuk bersaing dalam menarik dukungan masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum. Pergeseran ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara elite politik dan masyarakat. Kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor tradisional, melainkan oleh kemampuan para calon untuk meraih dukungan elektoral. Para calon pemimpin diharuskan untuk lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, mengadaptasi program kerja yang relevan, dan meningkatkan komunikasi dengan konstituen. Dengan demikian, proses pemilu

tidak hanya sekadar ritual politik, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, di mana suara rakyat menjadi penentu utama dalam pemilihan pemimpin. Perubahan ini mengarah pada pola kekuasaan lokal yang lebih modern, berbasis pada kehendak rakyat dan partisipasi publik. Masyarakat Jepara mulai menyadari kekuatan mereka dalam menentukan masa depan politik daerah mereka, mendorong partisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan. Hal ini menandakan bahwa Jepara, berkontribusi pada perjalanan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang, menjadikan daerah ini sebagai contoh transformasi politik yang positif. (Erlina, 2023).

Latar belakang penulisan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara, berakar dari pentingnya memahami perjalanan sejarah politik Indonesia yang masih muda pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 merupakan tonggak awal demokrasi di tanah air, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih terbuka setelah mengalami masa penjajahan yang panjang. Jepara, sebagai salah satu wilayah yang memiliki basis keagamaan yang kuat, menjadi contoh yang menarik untuk meneliti dinamika politik lokal yang terjadi selama pemilu ini. Dengan adanya berbagai partai politik, terutama yang berbasis agama seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), pergeseran dalam peta kekuatan politik di daerah ini dapat dilihat secara jelas.

Penulisan ini juga dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji interaksi antara ideologi agama dan nasionalisme yang muncul selama pemilu. Keberhasilan partai-partai berbasis Islam dalam meraih dukungan masyarakat menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama dan politik di Jepara. Dalam konteks ini, penulis ingin menyoroti bagaimana pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarpolitical, tetapi juga arena di mana masyarakat menghadapi pilihan-pilihan yang berkaitan dengan identitas dan nilai-nilai yang

mereka anut. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi di Jepara, termasuk akses informasi yang tidak merata dan fragmentasi politik yang muncul akibat perbedaan ideologi. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik lokal di Jepara pasca-Pemilu 1955 dan bagaimana hal tersebut mencerminkan perkembangan demokrasi di Indonesia kala itu. Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur sejarah dan ilmu politik di Indonesia, serta memberikan wawasan bagi pembaca tentang pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Pemilu 1955 di Jepara merupakan titik balik penting dalam sejarah politik lokal, karena membawa perubahan signifikan dalam konstelasi kekuasaan di tingkat daerah. Pemilu ini tidak hanya menandai pergeseran dalam cara pemimpin baru yang dipilih, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam interaksi antara ideologi agama dan nasionalisme (Windisari & Wahyuliana, 2022). Meskipun pemilu 1995 menghadirkan dampak negatif berupa fragmentasi politik yang menyebabkan ketegangan antar kelompok, proses demokrasi yang berlangsung justru membuka peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif di masa depan. Dengan kompleksitas politik yang ada, Jepara mencerminkan perjalanan demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Berbagai elemen sosial dan politik saling berinteraksi, membentuk pola-pola baru dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat juga mulai lebih aktif dalam melaksanakan proses politik, menyuarakan aspirasi dan harapan mereka terhadap pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih pemimpin yang baru, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun sistem politik yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, metode ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena politik lokal di Jepara pasca-Pemilu 1955. Penelitian kualitatif deskriptif difokuskan pada eksplorasi dan pemahaman mengenai sosial yang terjadi secara alami, dengan mengutamakan interpretasi subjektif dari data yang telah dikumpulkan (Umrati & Wijaya, 2021). Metode ini sangat cocok untuk penelitian yang ingin menggali dinamika kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama dalam tema politik yang melibatkan interaksi antar elemen sosial, budaya, dan ideologi. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana dinamika politik lokal berubah setelah Pemilu 1955 serta bagaimana pengaruh ideologi agama dan nasionalisme memengaruhi konfigurasi politik di Jepara.

Salah satu metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah observasi, yang dilaksanakan secara tidak langsung mengingat peristiwa yang diteliti sudah berlalu (SUKMA, 2020). Peneliti menggunakan observasi dokumen sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data yang relevan dari arsip sejarah, dokumen Pemilu 1955, dan catatan pemerintah. Observasi dokumen memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika politik lokal di Jepara pada masa itu dengan lebih mendalam. Dengan mengkaji dokumen yang ada, peneliti dapat menganalisis berbagai informasi terkait pola-pola politik, struktur kekuasaan, dan interaksi masyarakat pada periode pasca-Pemilu 1955. Melalui observasi dokumen, peneliti dapat mengumpulkan informasi penting mengenai bagaimana masyarakat dan elite politik lokal beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi setelah pemilu. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika politik berubah, bagaimana ideologi agama dan nasionalisme memengaruhi hubungan kekuasaan, serta bagaimana fragmentasi politik mulai muncul di

tingkat lokal. Observasi dokumen juga berfungsi sebagai sarana untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial dan politik, seperti pengaruh hubungan kekeluargaan, status sosial, dan afiliasi ideologis terhadap keputusan politik. Dokumen-dokumen tersebut memberikan peneliti kemampuan untuk meresapi topik sejarah dan sosial politik yang terjadi saat itu.

Selain observasi dokumen, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka atau literature review. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah literatur yang relevan guna memperkaya analisis terhadap perubahan konfigurasi politik di Jepara pasca-Pemilu 1955. Literatur yang ditelaah mencakup buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip Pemilu, serta karya ilmiah lainnya yang membahas politik lokal Indonesia pada era 1950-an. Studi pustaka berperan penting dalam mengumpulkan data sekunder yang dapat melengkapi data primer dari observasi dokumen (Nina Adlini et al., 2022). Studi pustaka membantu memperluas cakupan analisis dengan menyajikan berbagai perspektif yang berbeda mengenai dinamika politik lokal di Indonesia pada masa tersebut.

Langkah pertama dalam studi pustaka adalah identifikasi dan seleksi sumber-sumber literatur yang kredibel dan relevan (Febriansyah Putra & Patra, 2023). Peneliti berfokus pada literatur yang memiliki basis ilmiah yang kuat serta membahas isu-isu yang langsung terkait dengan penelitian ini. Karya-karya yang dipilih mencakup topik-topik yang meliputi peran ideologi agama dalam politik lokal, fragmentasi politik pasca-Pemilu 1955, serta dampak langsung dari pemilu terhadap struktur kekuasaan lokal di Jepara. Peneliti juga memprioritaskan sumber-sumber primer, seperti arsip pemerintah dan dokumen resmi, yang memberikan gambaran autentik tentang kondisi politik di Indonesia pada masa itu.

Setelah sumber-sumber yang relevan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah analisis tematik terhadap literatur tersebut. Dalam analisis ini, peneliti membagi literatur

ke dalam tema-tema yang sesuai dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Beberapa tema utama yang dianalisis meliputi peran ideologi agama, fragmentasi politik, serta perubahan dalam struktur kekuasaan lokal di Jepara. Dengan pendekatan tematik ini, peneliti dapat memahami dan membandingkan berbagai argumen serta temuan dari sumber yang berbeda secara lebih sistematis. Salah satu tema utama yang diangkat melalui studi pustaka adalah peran ideologi agama dalam politik lokal di Jepara. Pada era 1950-an, ideologi agama, terutama Islam, menjadi salah satu faktor penting dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Partai-partai politik berbasis agama, seperti Masyumi, memiliki pengaruh besar di banyak daerah, termasuk Jepara. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana ideologi agama ini memengaruhi pola-pola politik lokal, serta bagaimana pemimpin politik menggunakan ideologi agama untuk membangun dukungan elektoral. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana para politisi lokal memanfaatkan afiliasi agama untuk memperkuat basis politik mereka dan meraih dukungan masyarakat.

Selain peran ideologi agama, studi pustaka juga memfokuskan pada fragmentasi politik yang muncul setelah Pemilu 1955. Pemilu ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Jepara terpecah ke dalam beberapa kelompok politik yang berbeda, terutama antara partai-partai nasionalis dan partai-partai berbasis agama. Studi pustaka membantu peneliti untuk menganalisis penyebab dan dampak dari fragmentasi ini. Salah satu dampaknya adalah munculnya ketegangan politik di tingkat lokal, di mana persaingan antar partai politik semakin intensif. Fragmentasi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga memperlemah kohesi sosial di kalangan masyarakat Jepara, yang pada akhirnya berdampak pada proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Tema penting lainnya yang dikaji dalam studi pustaka adalah dampak Pemilu 1955 terhadap struktur

kekuasaan lokal. Sebelum pemilu, banyak pemimpin di tingkat lokal mempertahankan posisi mereka berdasarkan status sosial tradisional dan hubungan kekeluargaan. Namun, setelah Pemilu 1955, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh basis tradisional semata, melainkan melalui legitimasi yang diperoleh dari dukungan elektoral. Proses demokratisasi yang diperkenalkan oleh pemilu membuka peluang bagi pemimpin baru untuk muncul, sehingga menciptakan perubahan dalam struktur kekuasaan lokal. Studi pustaka membantu peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan ini terjadi, serta dampaknya terhadap hubungan antara elite lokal dan masyarakat. Literasi yang relevan juga menunjukkan bagaimana transformasi ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam politik Indonesia pada era pasca-kemerdekaan, di mana politik elektoral mulai menggantikan bentuk-bentuk kekuasaan tradisional.

Setelah data dari observasi dokumen dan studi pustaka terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena politik yang terjadi di Jepara pasca-Pemilu 1955 (Zakariah et al., 2020). Analisis deskriptif ini tidak berusaha menambahkan interpretasi yang spekulatif, melainkan berfokus pada penyajian fakta berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam tema-tema utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti peran ideologi agama, fragmentasi politik, dan perubahan dalam struktur kekuasaan lokal.

Melalui proses ini, peneliti mampu menggambarkan bagaimana Pemilu 1955 memengaruhi konfigurasi politik di Jepara. Proses demokratisasi yang diinisiasi oleh pemilu ini membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan lokal. Sebelum pemilu, kekuasaan lokal lebih banyak dikuasai oleh elite tradisional yang mendasarkan otoritas mereka pada status sosial dan hubungan kekeluargaan. Namun, setelah Pemilu 1955, politik elektoral mulai

menggantikan sistem kekuasaan tradisional ini, sehingga memungkinkan munculnya pemimpin baru yang memiliki legitimasi politik dari hasil pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana ideologi agama dan fragmentasi politik turut memainkan peran penting dalam mengubah dinamika politik di Jepara. Sementara itu, fragmentasi politik yang terjadi pasca-pemilu memperlihatkan bagaimana persaingan antar partai politik di Jepara mengarah pada perpecahan sosial dan politik, yang berdampak pada stabilitas politik lokal.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai perubahan politik lokal di Jepara pasca-Pemilu 1955. Melalui data yang dikumpulkan dari observasi dokumen dan studi pustaka, penelitian ini berhasil menunjukkan bagaimana Pemilu 1955 membawa perubahan signifikan terhadap stabilitas politik dan struktur kekuasaan di Jepara, yang sebelumnya didominasi oleh elite tradisional. Pemilu ini membuka jalan bagi proses demokratisasi dan munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana ideologi agama dan fragmentasi politik memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik setempat. Perubahan yang terjadi di Jepara mencerminkan bahwa dinamika politik nasional yang lebih luas, khususnya terkait transisi politik Indonesia pada era pasca-kemerdekaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dominasi Partai Politik dan Polarisasi Ideologi di Jepara pada Pemilu 1955**

Pemilu 1955 di Jepara menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah politik lokal, mengingat peristiwa tersebut merupakan kesempatan pertama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi pasca-kemerdekaan. Pemilu ini tidak hanya membuka jalan bagi perubahan dalam

dinamika politik lokal, tetapi juga mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam politik nasional Indonesia pada era pasca-kemerdekaan. Salah satu partai yang muncul sebagai kekuatan politik dominan di Jepara adalah Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai partai berbasis agama, NU berhasil memenangkan dukungan kuat dari masyarakat lokal yang sangat religius dan tradisional. Keberhasilan NU di Jepara menunjukkan kuatnya pengaruh agama dalam politik di wilayah ini, terutama karena mayoritas penduduk Jepara adalah Muslim yang taat. NU tidak hanya mampu menarik dukungan karena platform politiknya yang berbasis agama, tetapi juga karena hubungan yang kuat antara masyarakat Jepara dengan nilai-nilai keagamaan yang sudah lama mengakar. Masyarakat melihat NU sebagai perwakilan dari aspirasi keagamaan mereka, dan keberadaan pesantren-pesantren besar di Jepara semakin memperkuat posisi partai ini. Selain menawarkan kebijakan-kebijakan berbasis agama, NU juga menjanjikan perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat setempat (Rakhman, 2021). NU berhasil membangun citra sebagai partai yang tidak hanya membawa pesan politik, tetapi juga melindungi tradisi dan warisan budaya Islam yang penting bagi masyarakat Jepara.

Meskipun NU mendominasi dalam Pemilu 1955 di Jepara, partai-partai lain juga berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Partai Nasional Indonesia (PNI), yang mengusung ideologi nasionalisme, juga memiliki pengaruh di daerah ini, meskipun tidak sebesar NU. PNI berusaha mempertahankan basis dukungannya, terutama dari kalangan elite lokal dan birokrat yang lebih simpatik terhadap gagasan nasionalisme. Namun, ideologi nasionalis yang diusung PNI kurang menarik bagi masyarakat Jepara yang lebih religius. Meskipun PNI cukup kuat di wilayah lain yang lebih urban, seperti Yogyakarta dan Semarang, daya tarik partai ini di Jepara lebih lemah karena masyarakat di sini

cenderung lebih tertarik pada partai-partai berbasis agama seperti NU dan Masyumi (Sunan & Yogyakarta, 2021).

Dominasi NU dalam Pemilu 1955 di Jepara tidak lepas dari persaingan ketat dengan partai-partai lain yang memiliki ideologi berbeda. Partai Nasional Indonesia (PNI), yang mengusung ideologi nasionalisme, berusaha mempertahankan pengaruhnya di Jepara. Namun, dalam konteks lokal, ideologi nasionalis yang diusung PNI kurang diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan platform berbasis agama yang ditawarkan oleh NU dan Masyumi. Di daerah-daerah lain seperti Yogyakarta dan Semarang, PNI berhasil meraih dukungan kuat karena masyarakat di sana lebih urban dan terpapar oleh gagasan nasionalisme. Namun, di Jepara, yang lebih rural dan religius, PNI menghadapi tantangan besar untuk memenangkan simpati pemilih yang lebih condong pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun menghadapi kesulitan di basis masyarakat pedesaan, PNI masih berhasil mendapatkan dukungan dari kalangan elite lokal dan birokrat. Kelompok ini lebih simpatik terhadap gagasan nasionalisme yang didorong oleh PNI, terutama karena nasionalisme dilihat sebagai jalan menuju modernisasi dan pembangunan negara. Dukungan dari elit ini memungkinkan PNI untuk tetap relevan dalam politik lokal, meskipun tidak sekuat NU yang memiliki dukungan luas dari masyarakat umum.

Selain NU dan PNI, Masyumi juga berperan penting dalam menciptakan polarisasi ideologi di Jepara. Masyumi, sebagai partai Islam modernis, juga berusaha mendapatkan tempat dalam politik lokal Jepara. Masyumi mewakili kalangan Muslim perkotaan dan pedagang yang lebih progresif dibandingkan NU yang cenderung konservatif. Meskipun sama-sama berbasis agama, Masyumi tidak mampu menyaingi kekuatan NU di Jepara karena masyarakat lebih condong pada Islam tradisional yang diwakili oleh NU. Di wilayah-wilayah lain seperti Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, Masyumi berhasil meraih

dukungan yang lebih kuat karena masyarakat di sana lebih dekat dengan Islam modernis (Dalhar et al., 2019). Akan tetapi, di Jepara, Masyumi harus puas dengan dukungan yang lebih terbatas dan tidak mampu melampaui popularitas NU di kalangan masyarakat pedesaan yang religius.

Selain persaingan antara partai berbasis agama seperti NU dan partai nasionalis seperti PNI, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan dalam Pemilu 1955 di Jepara (Iskandar, 2017). Meskipun PKI tidak memperoleh dukungan sebesar NU atau PNI, keberadaan mereka tetap berperan dalam memengaruhi konfigurasi politik lokal. Ideologi komunis yang diusung PKI sangat bertentangan dengan platform yang dibawa oleh NU dan Masyumi, memperburuk polarisasi ideologi di Jepara. PKI, yang dikenal dengan gagasan revolusionernya, lebih mendapat dukungan dari kalangan buruh dan daerah perkotaan. Namun, di Jepara, yang mayoritas penduduknya adalah petani kecil dan masyarakat religius, PKI kurang diterima. Pengaruh mereka lebih kuat di daerah lain seperti Banyuwangi atau Blitar, namun di Jepara, kekuatan PKI terbatas karena ideologi komunis bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dipegang kuat oleh masyarakat lokal.

Polarisasi ideologi antara partai-partai berbasis agama, nasionalis, dan komunis tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Persaingan politik yang ketat sering kali melibatkan massa pendukung yang fanatik, terutama dari kalangan NU dan PNI. Masyarakat Jepara terpecah dalam afiliasi politik mereka, dan perbedaan ideologi yang mencolok sering kali memicu konflik sosial di tingkat lokal. Pendukung NU, misalnya, sangat vokal dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, sementara pendukung PNI lebih berfokus pada isu-isu nasionalis seperti pembangunan negara dan kemerdekaan. Polarisasi ini tidak hanya memengaruhi

kehidupan politik, tetapi juga memperburuk hubungan sosial antar kelompok di Jepara.

Struktur sosial Jepara pada masa itu juga dipengaruhi oleh polarisasi ideologi yang terjadi. Masyarakat petani yang lebih konservatif cenderung mendukung NU karena mereka melihat partai ini sebagai pelindung nilai-nilai agama dan tradisi. Di sisi lain, kelompok elit dan birokrat lokal lebih mendukung PNI karena dianggap mewakili modernisasi dan kemajuan bangsa. Meski di wilayah perkotaan seperti Jakarta atau Surabaya polarisasi ini mungkin lebih ditandai oleh perpecahan antara nasionalis dan komunis, di Jepara, peran agama lebih dominan dalam membentuk preferensi politik masyarakat.

Dominasi NU dan polarisasi ideologi yang terjadi di Jepara mencerminkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam menentukan arah politik di daerah ini. Persaingan antara NU, PNI, Masyumi, dan PKI bukan hanya merupakan pertarungan ideologis, tetapi juga mencerminkan perpecahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Polarisasi ini, meskipun memunculkan dinamika politik yang kompetitif, juga meninggalkan ketegangan sosial yang cukup signifikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang terpecah berdasarkan afiliasi ideologi mereka. Konflik-konflik kecil sering terjadi di tingkat lokal, terutama antara pendukung NU dan PNI yang memiliki pandangan politik yang sangat berbeda

Selain polarisasi ideologi, Pemilu 1955 di Jepara juga membawa perubahan dalam struktur kekuasaan lokal. Sebelum pemilu, banyak posisi kepemimpinan di tingkat lokal dikuasai oleh elite tradisional yang memiliki basis kekuasaan yang didasarkan pada status sosial atau hubungan keluarga. Namun, setelah pemilu, proses demokratisasi yang dimulai membuka jalan bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memperoleh legitimasi melalui dukungan elektoral. Pemilu 1955 menjadi momen penting dalam menggeser struktur kekuasaan tradisional ini, di mana elit

politik baru yang lebih demokratis mulai mengambil alih peran-peran kunci dalam pemerintahan lokal.



Gambar 1. Dominasi Partai Politik dalam Pemilu di Jepara Pada Tahun 1955

Sumber:

<https://kesbangpol.kapuashulukab.go.id/sejarah-dan-hasil-pemilihan-umum-1955/>

Pemilu ini juga memperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal di Jepara terkait erat dengan perkembangan politik nasional. Meskipun Jepara memiliki karakter sosial dan politik yang unik, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah ini setelah Pemilu 1955 mencerminkan tren yang lebih luas di seluruh Indonesia. Polarisasi ideologi antara partai-partai berbasis agama, nasionalis, dan komunis juga terjadi di tingkat nasional, dan persaingan antara kelompok-kelompok ini menjadi ciri khas dari politik Indonesia pada era pasca-kemerdekaan. Jepara, sebagai bagian dari daerah Jawa yang mayoritas Muslim, menjadi contoh bagaimana politik berbasis agama memainkan peran penting dalam membentuk konfigurasi politik lokal.

Secara keseluruhan, Pemilu 1955 di Jepara bukan hanya menjadi ajang persaingan politik, tetapi juga mencerminkan perpecahan ideologi yang lebih dalam yang terjadi di masyarakat. Dominasi NU, polarisasi ideologi, dan perubahan dalam struktur kekuasaan lokal semua menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang bagaimana politik lokal di Jepara berkembang setelah kemerdekaan. Dalam konteks ini, Pemilu 1955 tidak hanya membawa perubahan dalam pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial yang lebih luas, di mana agama, nasionalisme,

dan ideologi komunis bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

### **Partisipasi Masyarakat terhadap Politik Lokal dalam Pemilu 1955**

Partisipasi masyarakat Jepara dalam Pemilu 1955 menunjukkan tingkat keterlibatan yang luar biasa, mencerminkan awal dari kesadaran politik yang tumbuh pesat di daerah tersebut. Pemilu ini merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat Jepara dalam menjalani proses demokrasi formal di tingkat nasional, dan masyarakat menyambutnya dengan antusiasme yang tinggi. Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya partisipasi ini adalah keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jepara. Kampanye yang dilakukan partai politik seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran politik dalam menentukan masa depan mereka. Kampanye tersebut disampaikan melalui berbagai cara, seperti pertemuan di balai desa, pengajian, dan acara-acara keagamaan yang dengan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama di pedesaan.

Keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam kampanye politik juga menjadi kunci penting dalam membangkitkan partisipasi masyarakat (Fadhil et al., 2022). Di Jepara, di mana agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat, keterlibatan kiai dan ulama dalam mengampanyekan partai-partai berbasis agama sangat efektif dalam menarik dukungan. Di wilayah yang memiliki tradisi religius yang kuat, peran ulama dan kiai sangat berpengaruh dalam membentuk pilihan politik masyarakat. Kiai-kiai yang dihormati, terutama dari pesantren, sering kali menjadi juru bicara yang menyampaikan pesan politik yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian integral dari tata kelola negara. Pesan-pesan tersebut menggema di kalangan masyarakat yang percaya bahwa menjaga nilai-nilai Islam adalah kewajiban agama dan moral,

yang mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. NU sebagai representasi Islam tradisional sangat efektif memobilisasi dukungan melalui jaringan pesantren dan masjid, yang memperkuat legitimasi politik mereka di kalangan umat Muslim.

Masyumi, meskipun memiliki orientasi Islam modernis, juga menerapkan strategi yang serupa untuk mendekati masyarakat Muslim perkotaan dan pedagang. Kedua partai ini menyampaikan pesan-pesan politik mereka dengan cara yang sangat relevan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama yang terkait dengan agama. Ini menyebabkan partisipasi pemilih meningkat, terutama di wilayah pedesaan, di mana pesan-pesan keagamaan memiliki resonansi kuat. Kesadaran politik yang tumbuh di Jepara pada Pemilu 1955 bukan hanya karena partai politik semata, tetapi juga karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dapat menentukan masa depan bangsa dan agama. Peran agama dalam politik lokal Jepara tidak hanya mengikat dukungan dari kalangan masyarakat yang religius, tetapi juga memengaruhi cara partai-partai politik lainnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) melakukan kampanye mereka. PNI, yang berbasis pada ideologi nasionalis, harus beradaptasi dengan konteks lokal yang sangat religius. Meskipun PNI tidak berbasis agama, mereka tidak dapat mengabaikan pengaruh agama dalam politik, sehingga mereka berusaha menarik dukungan dari kalangan masyarakat yang lebih terdidik dan kelompok elit, yang memiliki visi nasionalisme kuat. Di daerah-daerah perkotaan seperti Jepara Kota, PNI mendapat dukungan dari kalangan pengusaha, pegawai pemerintah, dan guru, yang lebih simpatik terhadap isu-isu nasionalisme dan pembangunan negara. Namun, di pedesaan, di mana mayoritas pemilih lebih condong pada ideologi keagamaan, PNI harus berjuang keras untuk meraih simpati pemilih.

Jepara menjadi salah satu medan pertempuran politik yang sangat dinamis pada Pemilu 1955. Polarisasi ideologi yang terjadi

antara partai-partai berbasis agama dan nasionalis menciptakan perpecahan yang tajam di antara pemilih. NU dan Masyumi mendominasi di daerah-daerah yang sangat religius, sementara PNI berusaha meraih simpati pemilih di daerah perkotaan dan dari kalangan elit. Meskipun PNI menghadapi kesulitan besar di pedesaan, mereka tetap mampu meraih dukungan dari kalangan birokrat lokal yang melihat nasionalisme sebagai jalan menuju pembangunan bangsa yang lebih maju.

Partisipasi aktif masyarakat Jepara dalam Pemilu 1955 mencerminkan transformasi signifikan dalam kesadaran politik lokal, yang tidak lagi dikuasai oleh elite politik atau tokoh agama semata. Sebaliknya, proses politik mulai melibatkan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial, baik sebagai pemilih maupun peserta aktif dalam kampanye. Di tengah momentum tersebut, petani, pedagang, buruh, hingga pemuka agama ikut berkontribusi dalam diskusi politik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik tidak lagi eksklusif menjadi milik segelintir orang terdidik, tetapi telah meluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Di pedesaan, pertemuan-pertemuan politik menjadi forum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai arah politik lokal maupun nasional. Keterlibatan ini mendorong partai-partai politik untuk menyadari pentingnya membangun basis dukungan dari masyarakat yang lebih bawah. Oleh karena itu, mereka mengadopsi pendekatan kampanye yang lebih terbuka dan inklusif, yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, partai-partai ini tidak hanya mampu memperluas jangkauan dukungan, tetapi juga membangun rasa memiliki di antara pemilih.

Fenomena polarisasi ideologi di Jepara juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai

pemilih pasif, tetapi terlibat aktif dan terpolarisasi berdasarkan ideologi politik yang mereka anut. Di satu sisi, kelompok yang mendukung partai-partai berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi merasa bahwa peran agama harus diperkuat dalam politik. Mereka melihat pemilu sebagai momen untuk mengadvokasi nilai-nilai keagamaan dalam pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain, terdapat kelompok yang mendukung Partai Nasional Indonesia (PNI) dan partai-partai nasionalis lainnya yang lebih berfokus pada isu-isu pembangunan negara dan persatuan nasional. Polarisasi ini menciptakan tantangan dan peluang baru, karena meskipun dapat mengakibatkan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat, pada saat yang sama, intensitas keterlibatan politik meningkat. Masyarakat menjadi lebih terdorong untuk membela keyakinan dan ideologi yang mereka anut, sehingga keterlibatan mereka dalam proses pemilu menjadi lebih bersemangat dan penuh makna.

Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Surakarta atau Banyumas, partisipasi politik di Jepara dalam Pemilu 1955 tergolong tinggi, dan ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan agama serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kampanye. Di Jepara, peran NU sangat signifikan baik dalam konteks sosial maupun politik. Sebagai organisasi keagamaan yang mendukung partai-partai berbasis Islam seperti NU dan Masyumi, NU tidak hanya berperan dalam kampanye, tetapi juga aktif membangkitkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Mereka mendorong masyarakat untuk menganggap pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan moral mereka. Kiai dan pesantren, sebagai pusat pengajaran dan penggerak sosial, memainkan peran kunci dalam menggerakkan massa untuk mendukung partai-partai Islam. Hal ini menjadikan agama sebagai penggerak utama dalam partisipasi politik di wilayah ini. Dalam konteks ini, partai-partai berbasis agama mampu menarik dukungan luas dari

masyarakat yang religius, dan membuat pemilu sebagai momen penting dalam mengekspresikan aspirasi politik mereka.

Sementara itu, di Surakarta, meskipun terdapat basis Islam yang kuat, pengaruh nasionalisme dan etnisitas Jawa lebih dominan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki basis dukungan yang luas, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan dan pegawai negeri. Partisipasi politik di Surakarta lebih dipengaruhi oleh isu-isu ekonomi dan sosial, dibandingkan dengan di Jepara, di mana agama memiliki pengaruh yang lebih besar. Dalam konteks Banyumas, faktor ekonomi dan etnisitas juga menjadi penentu dalam partisipasi politik, di mana kampanye lebih menekankan isu-isu kesejahteraan. Meskipun partisipasi politik di Surakarta dan Banyumas juga signifikan, motivasi masyarakat dalam berpartisipasi jauh lebih beragam, sedangkan di Jepara, agama menjadi faktor sentral dalam pemilu pertama di Indonesia ini. Dengan demikian, pemilu di Jepara menunjukkan bagaimana konteks lokal dan budaya masyarakat sangat memengaruhi dinamika politik yang terjadi.

Secara keseluruhan, tingginya partisipasi masyarakat Jepara dalam Pemilu 1955 mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik yang kuat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama, ideologi, dan kampanye yang berhasil memobilisasi massa. Proses ini tidak hanya menggambarkan keterlibatan politik di tingkat lokal, tetapi juga menandakan bahwa demokrasi mulai mendapatkan tempat penting di hati masyarakat Jepara. Tingginya angka partisipasi ini menjadi bukti bahwa politik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Jepara, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk terlibat dalam menentukan masa depan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Kesadaran politik yang meluas ini, bersamaan dengan keterlibatan aktif dalam pemilu, menciptakan harapan bagi masa depan

demokrasi di Indonesia, di mana suara dan pilihan masyarakat diakui dan dihargai. Melalui partisipasi yang tinggi dalam Pemilu 1955, masyarakat Jepara menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap berkontribusi dalam politik, tetapi juga memiliki aspirasi untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa yang lebih luas.

### **Dampak Pemilu 1955 terhadap Politik Lokal di Jepara**

Pemilu 1955 di Jepara menandai momen penting dalam perkembangan politik lokal yang berimplikasi jauh lebih luas. Menurut (Dalhar et al., 2019), pemilu ini memicu perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan dan dinamika politik di daerah tersebut. Salah satu dampak utama dari pemilu ini adalah pergeseran kekuatan politik yang terjadi di Jepara, di mana partai-partai yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi, akhirnya berhasil meraih dukungan signifikan dari masyarakat. Latar belakang religius masyarakat Jepara berperan penting dalam fenomena ini, di mana partai-partai berbasis agama mampu menarik simpati besar melalui kampanye yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dukungan ini berimplikasi pada penggeseran dominasi partai-partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), yang sebelumnya memiliki pengaruh kuat di Jepara. Pergeseran ini mencerminkan bagaimana ideologi agama menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat Jepara pada masa itu.

Kemenangan besar partai-partai berbasis agama, terutama NU, menciptakan perubahan mendalam dalam tatanan politik lokal. Sebelum Pemilu 1955, PNI cenderung menjadi partai dominan di banyak wilayah di Jawa Tengah, termasuk Jepara, berkat representasi ideologi nasionalisme yang kuat. Namun, munculnya NU sebagai kekuatan baru mengubah arus dukungan politik di Jepara, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan

yang religius. NU, yang berfungsi sebagai representasi Islam tradisional, berhasil membangun jaringan politik yang kuat di tingkat lokal. Mereka memanfaatkan struktur sosial keagamaan seperti pesantren dan masjid untuk memperkuat basis dukungannya (A'la & Zamzami, 2023). Dengan pendekatan ini, NU mampu menggalang dukungan yang luas dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga para elit politik lokal harus menyesuaikan diri dengan realitas politik baru di mana kekuatan Islam memegang peranan penting dalam menentukan arah politik di Jepara.

Masyumi, sebagai partai Islam modernis, juga memperoleh dukungan dalam Pemilu ini, meskipun dengan fokus yang lebih terbatas pada kelompok-kelompok yang lebih terdidik dan masyarakat perkotaan. Masyumi mampu menarik perhatian kalangan pedagang dan intelektual di Jepara yang mendambakan modernisasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kombinasi kekuatan NU dan Masyumi menciptakan dinamika politik baru di Jepara, di mana kedua partai ini berkompetisi tidak hanya dengan partai nasionalis seperti PNI, tetapi juga dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun PKI tidak terlalu kuat di Jepara, mereka tetap memiliki pengaruh di beberapa kantong masyarakat buruh dan petani miskin, menciptakan lanskap politik yang semakin beragam dan kompleks.

Salah satu dampak paling nyata dari Pemilu 1955 di Jepara adalah terjadinya fragmentasi politik di tingkat lokal akibat perbedaan ideologis antar partai. Polarisasi antara partai berbasis agama, nasionalis, dan komunis menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Pergeseran dukungan dari satu partai ke partai lainnya sering kali memicu konflik di antara para pendukung. Misalnya, bentrokan ideologi antara pendukung PNI dan NU kerap kali menjadi penyebab ketegangan sosial di beberapa desa. Ketegangan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup diskusi politik, tetapi juga merambah ke dalam hubungan sosial sehari-hari, di mana perbedaan pilihan politik mulai

memengaruhi interaksi antarindividu dan kelompok di masyarakat. Fragmentasi politik ini, meskipun menciptakan lebih banyak pilihan politik bagi masyarakat, juga memperdalam perpecahan ideologis yang terkadang mengarah pada konflik terbuka. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk memilih wakil, tetapi juga arena pertarungan ideologis yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di tingkat lokal.

Hasil Pemilu 1955 tidak hanya memengaruhi hubungan antara partai-partai politik, tetapi juga relasi antara elit politik lokal dengan masyarakat. Para tokoh politik yang terpilih melalui Pemilu ini mulai memainkan peran yang lebih besar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat nasional, terutama melalui Konstituante, lembaga yang dibentuk setelah Pemilu untuk merumuskan konstitusi baru bagi Indonesia. Tokoh-tokoh politik dari Jepara yang terpilih mewakili suara masyarakat di forum nasional, yang menandai semakin besarnya peran Jepara dalam peta politik nasional. Perwakilan dari NU, misalnya, menjadi aktor penting dalam Konstituante dan ikut serta dalam perdebatan seputar dasar negara, termasuk penerapan syariat Islam dalam konstitusi. Peran mereka ini menunjukkan bahwa Pemilu 1955 tidak hanya berdampak pada politik lokal, tetapi juga membuka jalan bagi tokoh-tokoh politik lokal untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting di tingkat nasional.

Selain itu, Pemilu 1955 juga mengubah cara masyarakat memandang politik lokal. Sebelum Pemilu, masyarakat Jepara cenderung melihat politik sebagai domain yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan partisipasi aktif dalam Pemilu, masyarakat mulai melihat politik sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu ini, yang didorong oleh kampanye intensif partai-partai politik, menciptakan kesadaran politik baru di Jepara. Masyarakat mulai lebih terlibat dalam diskusi politik dan lebih sadar akan peran mereka

dalam menentukan masa depan politik daerah mereka. Pergeseran ini menandai perubahan besar dalam pola hubungan antara rakyat dan politik, di mana politik tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang eksklusif bagi elit, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemilu ini mengubah persepsi masyarakat terhadap politik, dari sesuatu yang terasing menjadi sesuatu yang dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Perbandingan dengan daerah lain di Jawa Tengah menunjukkan bahwa dampak Pemilu 1955 di Jepara sejalan dengan tren yang terjadi di daerah-daerah lain yang memiliki basis agama kuat, seperti Kudus dan Pekalongan. Di daerah-daerah tersebut, partai-partai berbasis Islam juga berhasil memperoleh dukungan signifikan, dan fragmentasi politik yang terjadi di tingkat lokal juga mirip dengan apa yang dialami oleh Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk preferensi politik masyarakat di daerah-daerah tersebut. Namun, di daerah seperti Semarang, di mana masyarakat lebih heterogen dan pengaruh partai nasionalis lebih kuat (Ahmad et al., 2019), polarisasi politik yang terjadi lebih didominasi oleh persaingan antara PNI dan PKI, dengan partai-partai Islam memainkan peran yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Pemilu 1955 terhadap politik lokal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti struktur sosial, agama, dan ekonomi, yang berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Meskipun Pemilu 1955 membawa dampak positif dalam hal peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat, dampak negatif juga muncul dari perpecahan yang terjadi. Fragmentasi politik yang terjadi dalam masyarakat Jepara tidak hanya memperumit dinamika politik lokal, tetapi juga menciptakan tantangan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Ketegangan yang muncul antara kelompok-kelompok politik dapat menghalangi upaya untuk mencapai konsensus

dalam pengambilan keputusan dan menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, tantangan yang dihadapi akibat perpecahan ideologis tetap memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi, yang berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat religius. Pergeseran ini juga memperdalam polarisasi ideologis dalam masyarakat, dengan terbentuknya perbedaan pandangan antara pendukung partai agama dan partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Fragmentasi politik yang dihasilkan dari perbedaan ideologis ini memang memperumit dinamika politik lokal, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses politik. Masyarakat Jepara mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam menentukan arah politik daerah. Pemilu 1955 tidak hanya mengubah struktur kekuasaan di Jepara, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap politik, yang menandai langkah maju menuju demokrasi yang lebih inklusif.

Dampak Pemilu 1955 di Jepara mencerminkan dinamika yang lebih luas di Indonesia, menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih matang. Partisipasi aktif masyarakat Jepara dalam pemilu ini menunjukkan kontribusi signifikan dalam pembentukan identitas politik yang inklusif dan representatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik tidak hanya memperkuat suara mereka, tetapi juga menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan kesadaran politik. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, Pemilu 1955 memberikan contoh konkret tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Hal ini menandakan bahwa demokrasi bukanlah milik elit politik semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat.

### **Tantangan Pasca Pemilu 1955 di Jepara**

Setelah Pemilu 1955, Jepara menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan stabilitas politik lokal dan bagaimana para aktor politik menavigasi dinamika baru yang dihasilkan dari kontestasi politik yang ketat. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah fragmentasi politik yang diakibatkan oleh perbedaan ideologi antara partai-partai besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Fragmentasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elit politik, tetapi juga di kalangan masyarakat, menciptakan garis pemisah yang tajam antara kelompok-kelompok pendukung partai yang berbeda.

Pada awalnya, kemenangan NU dan Masyumi di Jepara memberikan harapan bagi masyarakat yang menginginkan representasi lebih kuat dari nilai-nilai Islam dalam politik lokal. Namun, perbedaan ideologis yang mendalam antara kelompok-kelompok nasionalis, religius, dan komunis memperburuk polarisasi yang sudah ada. Fragmentasi ini memperumit proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, karena para pemimpin politik harus menghadapi tantangan dalam menciptakan konsensus di tengah perbedaan ideologi yang mencolok. Konflik ideologis ini seringkali menimbulkan ketegangan di antara pendukung partai-partai besar, dengan beberapa insiden bentrokan sosial yang terjadi di beberapa wilayah Jepara.

Kemudian, tantangan lainnya adalah konflik internal dalam partai-partai itu sendiri. Partai-partai seperti NU dan Masyumi, meskipun berhasil memenangkan dukungan luas, juga mengalami friksi internal (Budiarti et al., 2018), yang membuat konsolidasi kekuasaan menjadi lebih sulit. Di satu sisi, NU berusaha menjaga kohesinya sebagai partai berbasis Islam tradisional, tetapi di sisi lain, harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih moderat atau progresif di dalam partainya sendiri. Hal yang sama terjadi di Masyumi, di mana perbedaan pendapat tentang

strategi politik dan hubungan dengan partai-partai nasionalis memperlambat upaya untuk membentuk pemerintahan lokal yang stabil dan efektif.

Meskipun Pemilu 1955 memberikan keuntungan kepada partai-partai Islam seperti NU dan Masyumi, ketidakmampuan untuk menyatukan kekuatan politik mereka di tingkat lokal seringkali menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan (Subekti, 2024). Fragmentasi politik ini juga memperburuk ketidakstabilan pemerintahan lokal, karena setiap partai berusaha untuk memaksimalkan keuntungan politiknya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat (Pugu, 2024).

Selain masalah fragmentasi, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana para wakil rakyat yang terpilih mampu memperjuangkan kepentingan lokal di tengah dinamika politik nasional yang juga sedang bergejolak. Setelah Pemilu 1955, para anggota Konstituante dari Jepara dihadapkan pada situasi politik nasional yang sangat kompleks (Asmara & Yuhardi, 2023). Perdebatan mengenai dasar negara, terutama antara kelompok yang mendukung Pancasila dan kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam, semakin memanas di Konstituante. Dalam konteks ini, wakil rakyat dari Jepara, terutama dari NU, harus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa suara masyarakat Jepara, yang sebagian besar adalah masyarakat Islam tradisional, dapat terdengar di forum nasional. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena mereka harus bersaing dengan suara-suara dari daerah lain yang mungkin memiliki kepentingan berbeda.

Para wakil rakyat dari Jepara juga menghadapi tekanan besar dari konstituen mereka. Masyarakat berharap bahwa dengan terpilihnya para wakil dari partai-partai Islam, mereka akan dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam kenyataannya, para wakil ini harus berhadapan dengan kompromi politik yang seringkali tidak menguntungkan bagi kepentingan lokal. Di tingkat nasional,

mereka harus bersaing dengan kekuatan politik lain yang memiliki agenda berbeda, sementara di tingkat lokal, mereka dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan cepat. Ketegangan ini menciptakan situasi yang sangat rumit, di mana para wakil rakyat harus menavigasi antara kepentingan nasional dan lokal, serta berupaya menjaga stabilitas di daerahnya masing-masing.

Peran tokoh-tokoh lokal dalam mempertahankan stabilitas politik di Jepara juga menghadapi tantangan berat. Para elit politik lokal yang terpilih dari Pemilu 1955 harus berupaya menjaga harmoni di tengah masyarakat yang terpecah akibat perbedaan ideologis. Sebagai contoh, ketika terjadi ketegangan antara pendukung NU dan PNI, para pemimpin lokal harus memainkan peran mediasi untuk mencegah konflik yang lebih besar. Dialog politik di antara berbagai kelompok menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas, meskipun upaya ini seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan yang sulit dijumpai.

Meskipun tantangan politik ini besar, Pemilu 1955 juga membuka ruang baru bagi dialog politik dan kerjasama antar kelompok yang berbeda pandangan. Di Jepara, misalnya, meskipun perbedaan ideologis antara NU, Masyumi, PNI, dan PKI sangat tajam, ada upaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama dalam hal-hal tertentu, seperti isu-isu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin politik di Jepara menyadari bahwa tanpa kerjasama antarpantai, sulit untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai inisiatif untuk membentuk koalisi dan aliansi lintas partai mulai muncul, meskipun seringkali menghadapi banyak kendala di lapangan.

Sebagai perbandingan, di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Surakarta dan Yogyakarta, tantangan fragmentasi politik dan konflik ideologis juga terjadi, namun dengan intensitas yang berbeda. Di Surakarta, misalnya, PNI tetap dominan meskipun ada

persaingan ketat dengan PKI, sementara partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU memiliki peran yang lebih kecil. Di Yogyakarta, partai-partai Islam memiliki kekuatan yang lebih besar, namun persaingan antarpantai tidak seintens di Jepara, karena ada upaya lebih besar untuk menjaga harmoni politik di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tantangan politik pasca Pemilu 1955 sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan struktur sosial di setiap daerah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan yang dihadapi Jepara setelah Pemilu 1955 mencerminkan kompleksitas politik di Indonesia pada masa itu. Meskipun Pemilu ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, hasilnya juga memunculkan fragmentasi dan polarisasi yang memperburuk stabilitas politik di tingkat lokal. Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, ada juga harapan bahwa melalui dialog politik dan kerjasama antarpantai, Jepara dapat menemukan jalan untuk mengatasi perbedaan ideologis dan membangun masa depan politik yang lebih stabil dan inklusif.

Untuk mengatasi tantangan pasca Pemilu 1955 di Jepara, diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak dalam proses politik. Salah satu solusi utama adalah memperkuat dialog politik antarpantai (Agustin et al., 2024). Mengingat fragmentasi politik yang terjadi di Jepara disebabkan oleh perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai besar seperti NU, Masyumi, PNI, dan PKI, penting bagi para elit politik lokal untuk membangun jalur komunikasi yang terbuka dan produktif. Dialog politik tidak hanya harus melibatkan para pemimpin partai, tetapi juga tokoh masyarakat dan pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar di kalangan konstituen. Dengan adanya komunikasi yang lebih intens, perbedaan ideologis dapat dijumpai melalui kesepakatan-kesepakatan yang pragmatis, terutama dalam isu-isu yang bersifat mendesak seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain

itu, forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok sosial dan politik dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman antar kelompok.

Selain dialog politik, upaya untuk memperkuat institusi lokal juga menjadi solusi penting. Pemerintahan lokal yang lebih kuat, yang didukung oleh birokrasi yang profesional, dapat membantu menciptakan stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Pemilu 1955 memperlihatkan bahwa partai-partai di Jepara memiliki basis dukungan yang kuat, namun kelemahan dalam manajemen pemerintahan seringkali memperburuk ketidakstabilan politik (Hikmah, 2024). Dengan memperkuat institusi pemerintahan lokal melalui reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, konflik ideologis dapat dikelola dengan lebih baik. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan lebih mampu menjalankan program-program pembangunan yang dapat menguntungkan seluruh masyarakat, terlepas dari afiliasi politik mereka.

Di sisi lain, pendekatan inklusif dalam kebijakan pembangunan juga bisa menjadi solusi untuk meredakan polarisasi. Dengan merancang kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok, pemerintah lokal di Jepara dapat membangun rasa kepercayaan dari masyarakat. Program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang bersifat universal—seperti peningkatan akses pendidikan, pembangunan jalan, serta layanan kesehatan—dapat membantu mengurangi ketegangan politik dengan fokus pada kesejahteraan bersama. Partai-partai yang berkuasa di Jepara juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk memperlihatkan bahwa mereka bekerja untuk seluruh masyarakat, bukan hanya konstituen tertentu.

Pemberdayaan masyarakat sipil juga penting dalam proses penyelesaian masalah pasca Pemilu 1955. Masyarakat sipil, seperti organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok-kelompok pemuda, memiliki peran penting sebagai jembatan antara

masyarakat umum dan elit politik. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti musyawarah desa, yang memungkinkan aspirasi warga untuk lebih didengar. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan politik tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi potensi konflik dengan menyediakan wadah bagi penyelesaian masalah secara damai dan demokratis (Sepyah et al., 2022).

Selain itu, pemerintah lokal dan tokoh masyarakat dapat mendorong pendidikan politik yang lebih baik untuk masyarakat. Pendidikan politik yang menekankan pentingnya toleransi, pluralisme, dan dialog dapat mengurangi polarisasi ideologis di antara warga. Pemahaman yang lebih baik mengenai sistem politik, peran partai politik, dan pentingnya kerjasama lintas partai dapat membantu menciptakan budaya politik yang lebih sehat di Jepara. Hal ini juga bisa mendorong masyarakat untuk mendukung kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau partai tertentu.

Terakhir, rekonsiliasi antar kelompok yang terlibat dalam konflik ideologis pasca Pemilu juga perlu diupayakan. Proses rekonsiliasi ini dapat difasilitasi oleh pemimpin agama, yang memiliki pengaruh besar di Jepara, untuk meredakan ketegangan dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui dialog interaktif yang melibatkan berbagai kelompok ideologis, masyarakat dapat diarahkan untuk lebih fokus pada isu-isu yang bersifat membangun dan menghindari konflik yang merugikan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tantangan fragmentasi politik dapat diminimalisir dan stabilitas politik lokal di Jepara dapat tercipta kembali.

## SIMPULAN

Pemilu 1955 di Jepara merupakan titik balik yang signifikan dalam perjalanan politik lokal, memberikan dampak mendalam pada dinamika sosial dan politik di daerah tersebut.

Sebagai salah satu pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, peristiwa ini menandai perubahan besar dalam cara masyarakat terlibat dalam politik. Dengan munculnya partai-partai berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi, kekuatan politik di Jepara mengalami pergeseran yang signifikan. Sebelumnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendominasi peta politik, tetapi dengan meningkatnya dukungan terhadap NU dan Masyumi, terjadi pergeseran yang mencerminkan perubahan preferensi masyarakat. Masyarakat Jepara, yang dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat, menunjukkan minat yang besar terhadap ideologi yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka, sehingga menciptakan iklim politik yang lebih plural dan beragam.

Salah satu dampak terbesar dari Pemilu 1955 adalah munculnya fragmentasi politik yang terlihat jelas di tingkat lokal. Polarisasi ideologis antara partai-partai berbasis agama, nasionalis, dan komunis menciptakan ketegangan yang nyata dalam masyarakat. Ketegangan ini diperparah oleh dukungan yang mengalir kepada NU dan Masyumi, yang berbanding terbalik dengan penurunan dukungan terhadap PNI. Dukungan yang kuat terhadap partai-partai berbasis agama ini menandakan bahwa masyarakat Jepara menginginkan representasi politik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Namun, dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan di tingkat politik, tetapi juga merambah ke dalam hubungan sosial masyarakat, di mana perbedaan pandangan politik mulai memengaruhi interaksi antarindividu. Fragmentasi politik ini menunjukkan betapa pentingnya dialog dan toleransi dalam masyarakat yang semakin beragam secara ideologis.

Partisipasi masyarakat yang meningkat selama Pemilu 1955 juga merupakan indikator penting dari kesadaran politik yang berkembang di Jepara. Sebelumnya, politik dianggap sebagai domain elit yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun,

dengan keterlibatan aktif dalam proses pemilihan, masyarakat mulai menyadari bahwa politik adalah sarana untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, Pemilu 1955 tidak hanya menjadi ajang pemilihan, tetapi juga sebagai media untuk pendidikan politik yang mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran politik yang tumbuh di kalangan masyarakat ini membawa mereka untuk lebih terlibat dalam diskusi politik, menyadari peran mereka dalam menentukan arah masa depan daerah mereka. Hal ini menjadi tonggak penting dalam hubungan antara rakyat dan politik, di mana politik tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang eksklusif bagi elit, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial.

Pemilu 1955 juga membuka jalan bagi tokoh-tokoh politik lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Setelah pemilihan, wakil-wakil yang terpilih dari Jepara mulai memainkan peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di forum nasional. Misalnya, mereka terlibat dalam Konstituante, lembaga yang dibentuk untuk merumuskan konstitusi baru bagi Indonesia. Dengan demikian, Pemilu 1955 tidak hanya berdampak pada struktur politik lokal, tetapi juga berkontribusi pada perubahan politik di tingkat nasional. Partisipasi tokoh-tokoh politik Jepara dalam perdebatan mengenai dasar negara, termasuk isu-isu seperti penerapan syariat Islam, menunjukkan bahwa suara masyarakat daerah mulai mendapatkan perhatian di tingkat yang lebih luas. Hal ini menandakan bahwa aspirasi lokal kini dapat bersinergi dengan keputusan yang lebih besar di tingkat nasional, sehingga memperkuat legitimasi politik di Jepara.

Dari segi sosial, dampak Pemilu 1955 juga terlihat dalam perubahan cara masyarakat memandang dan terlibat dalam politik. Kesadaran politik yang tumbuh di kalangan masyarakat Jepara tidak hanya mengubah cara mereka berinteraksi dengan politik, tetapi juga memengaruhi pola hubungan sosial dalam

komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik membuat mereka lebih terbuka dalam berdiskusi tentang isu-isu politik, menciptakan ruang untuk dialog sosial yang lebih konstruktif. Ini penting untuk membangun kohesi sosial di tengah perbedaan ideologis yang ada. Di sisi lain, munculnya ketegangan akibat perbedaan pandangan politik dapat menimbulkan konflik, sehingga dialog dan kerja sama antar kelompok harus ditekankan untuk mencapai stabilitas sosial.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, dampak Pemilu 1955 di Jepara menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Di daerah-daerah dengan basis agama yang kuat seperti Kudus dan Pekalongan, partai-partai berbasis Islam juga berhasil memperoleh dukungan signifikan, menciptakan pola yang mirip dengan yang terjadi di Jepara. Namun, di daerah seperti Semarang, di mana pengaruh partai nasionalis lebih dominan, polarisasi politik lebih didominasi oleh persaingan antara PNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa konteks lokal sangat mempengaruhi dinamika politik yang terjadi di masing-masing daerah. Dalam hal ini, kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh program dan ideologi mereka, tetapi juga oleh bagaimana mereka mampu membangun jaringan sosial yang kuat di kalangan masyarakat.

Pemilu 1955 di Jepara menjadi cerminan awal perjalanan demokrasi di Indonesia, menandai momen penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam politik. Proses pemilihan umum ini tidak hanya menghadirkan perubahan kekuatan politik, tetapi juga menciptakan fragmentasi ideologis yang menunjukkan bahwa masyarakat Jepara tidak sekadar menjadi penonton dalam arena politik. Mereka berkontribusi nyata dalam pembentukan masa depan politik daerah mereka, yang menunjukkan adanya kesadaran bahwa setiap suara penting dan memiliki dampak. Hal ini menjadi langkah maju menuju demokrasi yang lebih matang, di mana

masyarakat mulai merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Dari segi makna, Pemilu 1955 menandai pergeseran signifikan dalam struktur politik Jepara, yang sebelumnya dikuasai oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), menuju dominasi partai-partai berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi. Pergeseran ini mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki representasi politik yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, terutama dalam konteks masyarakat Jepara yang dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat. Dengan semakin kuatnya dukungan terhadap partai-partai ini, masyarakat Jepara menunjukkan bahwa mereka ingin terlibat dalam proses politik yang lebih inklusif dan mewakili aspirasi mereka.

Lebih jauh lagi, Pemilu 1955 di Jepara menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia secara keseluruhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa politik tidak hanya menjadi milik segelintir elit, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Kesadaran politik yang tumbuh di kalangan masyarakat memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam sistem politik yang lebih representatif dan inklusif. Masyarakat Jepara, dengan keberagaman budaya dan religiusitasnya, memberikan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, Pemilu 1955 menjadi pelajaran penting bagi generasi mendatang tentang nilai partisipasi politik dan peran masyarakat dalam menentukan arah politik daerah dan nasional.

Namun, tantangan yang dihadapi pasca Pemilu 1955 tidak dapat diabaikan. Proses politik yang baru lahir ini memerlukan pendekatan komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas. Dialog antarpartai menjadi penting untuk meredakan ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan ideologis yang kuat. Reformasi institusi pemerintahan lokal dan pemberdayaan masyarakat sipil juga diperlukan untuk

menciptakan ruang bagi partisipasi yang lebih besar dan inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan politik dan rekonsiliasi antar kelompok sangat penting untuk mengurangi potensi konflik. Dengan upaya-upaya ini, Jepara berpotensi untuk melanjutkan perjalanan menuju stabilitas politik yang lebih baik, di mana setiap elemen masyarakat merasa terlibat dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, Pemilu 1955 di Jepara bukan sekadar pemilihan wakil rakyat, tetapi juga menjadi panggung bagi masyarakat untuk

mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka. Dengan pemahaman bahwa demokrasi yang kuat memerlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, Jepara dapat mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa semua suara dihargai dan diperhitungkan. Sejarah Pemilu 1955 harus terus diingat sebagai fondasi bagi perjalanan demokrasi yang lebih baik di Indonesia, mengingatkan kita akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). DINAMIKA KETEGANGAN POLITIK PASCA PEMILU 2024 DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. *Governance*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>
- Ahmad, N. R., Putri, D., Wijayati, A., & Sejarah, J. (2019). Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, Nu, dan Masyumi). In *Journal of Indonesian History* (Vol. 8, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>
- A'la, A., & Zamzami, M. (2023). *Relasi Kuasa Kiai Tua dan Kiai Muda: Studi Tentang Islamisme Gerakan Aliansi Ulama dan Forum Kiai Muda Madura*.
- Asmara, D., & Yuhardi, Y. (2023). Pasang Surut Demokrasi Indonesia (1945-1965). *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 15–24. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5320>
- Budiarti, A. P., Haris, syamsuddin, & Romli, L. (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*.
- Dalhar, M., Rochwulaningsih, Y., & Puguh, D. R. (2019). Kiai Fauzan: Pemikiran dan Peranannya di Kabupaten Jepara 1942-1972. *Indonesian Historical Studies*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.14710/ihis.v3i1.5095>
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Fadhil, R., MA, U., & Ahmandy, I. (2022). PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU 2019. 7(1).
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and*

- Pedagogy*, 2(1), 95–102.  
<https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Hikmah, P. N. (2024). DINAMIKA PERGANTIAN KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL: DAMPAK TERHADAP STABILITAS POLITIK 1950-1959. *Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 8(2), 32–48.  
<https://doi.org/10.37478/sajaratun.v8i2.3182>
- Iskandar, D. (2017). KEBERADAAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK DIKETAHUI MENELUSURI FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 26–37.  
<https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1632>
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA* (Vol. 6, Issue 1).
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). *Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)*. 7(1).
- Lutfiana, W. R. N. (2017). USAHA-USAHA PENGGAGALAN PEMILIHAN UMUM PERTAMA TAHUN 1955. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Pipit Nur'Aini. (2024). KAMPANYE PRA PEMILU 1955: ANTARA PARTAI PNI, MASYUMI, NAHDATUL ULAMA, DAN PKI HINGGA DAMPAK PASCA PEMILU 1955. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 6(1), 25–31.  
<https://doi.org/10.32585/keraton.v6i1.4612>
- Pugu, M. R. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*.
- Rakhman, A. S. (2021). Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>
- Subekti, D. (2024). POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI. In *JISIP-UNJA* (Vol. 8, Issue 1).
- SUKMA, A. S. (2020). PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS KETELADANAN GURU DAN PEMBIASAAN MURID SIT AL BIRUNI JIPANG KOTA MAKASSAR. *Education and Human Development Journal*, 5(1), 91–99.  
<https://doi.org/10.33086/ehdj.v5i1.1453>
- Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2021). *Fanatisme Politik Islam: Ideologisasi Partai Ka'bah di Jepara Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi M Rizal Qasim* (Vol. 1, Issue 1).
- Umрати, & Wijaya, H. (2021). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*.
- Windisari, Y., & Wahyuliana, I. (2022). Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Keekerabatan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 53–65.  
<https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.13089>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, KH. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*.